

ABDURRAHMAN WAHID

Dr. K.H. Abdurrahman Wahid, Lc., atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur, adalah seorang politikus Indonesia dan pemimpin agama Islam yang menjabat sebagai presiden Indonesia ke-4, dari pemilu tahun 1999 hingga pemakzulannya pada tahun 2001. Gus Dur memiliki kebijakan-kebijakan saat menjabat sebagai presiden ke-4.



KEBIJAKAN POLITIK

Pada awal pemerintahannya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membubarkan Departemen Penerangan untuk mendukung kebebasan pers, merestrukturisasi Departemen Koperasi dan PKM, serta mewacanakan pencabutan Tap MPR Nomor 25 Tahun 1966 meskipun kontroversial. Ia juga membuka wacana hubungan dagang dengan Israel yang akhirnya ditunda karena protes, dan mencabut larangan ekspresi budaya Tionghoa, menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional.



KEBIJAKAN EKONOMI

Pada masa Reformasi, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk memperbaiki ekonomi Indonesia pasca-krisis 1997-1998. Dipimpin oleh Prof. Dr. Emil Salim, DEN berhasil menstabilkan rupiah di Rp 6.700 dan indeks harga saham (IHSG) di 700, meningkatkan ekspor dan pendapatan negara dari minyak dan gas. Gus Dur juga menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia tanpa bantuan IMF.



KEBIJAKAN HANKAM

Abdurrahman Wahid menciptakan supremasi sipil dengan memilih Menteri Pertahanan dari kalangan sipil, Juwono Sudarsono. Selama pemerintahannya, menghadapi Gerakan Aceh Merdeka dengan pendekatan kebudayaan dan mendirikan Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (Keppres No. 88). Wahid juga mengimplementasikan pemisahan TNI-Polri, menempatkannya di bawah kuasa langsung kepresidenan melalui Keppres Nomor 89 Tahun 2000.



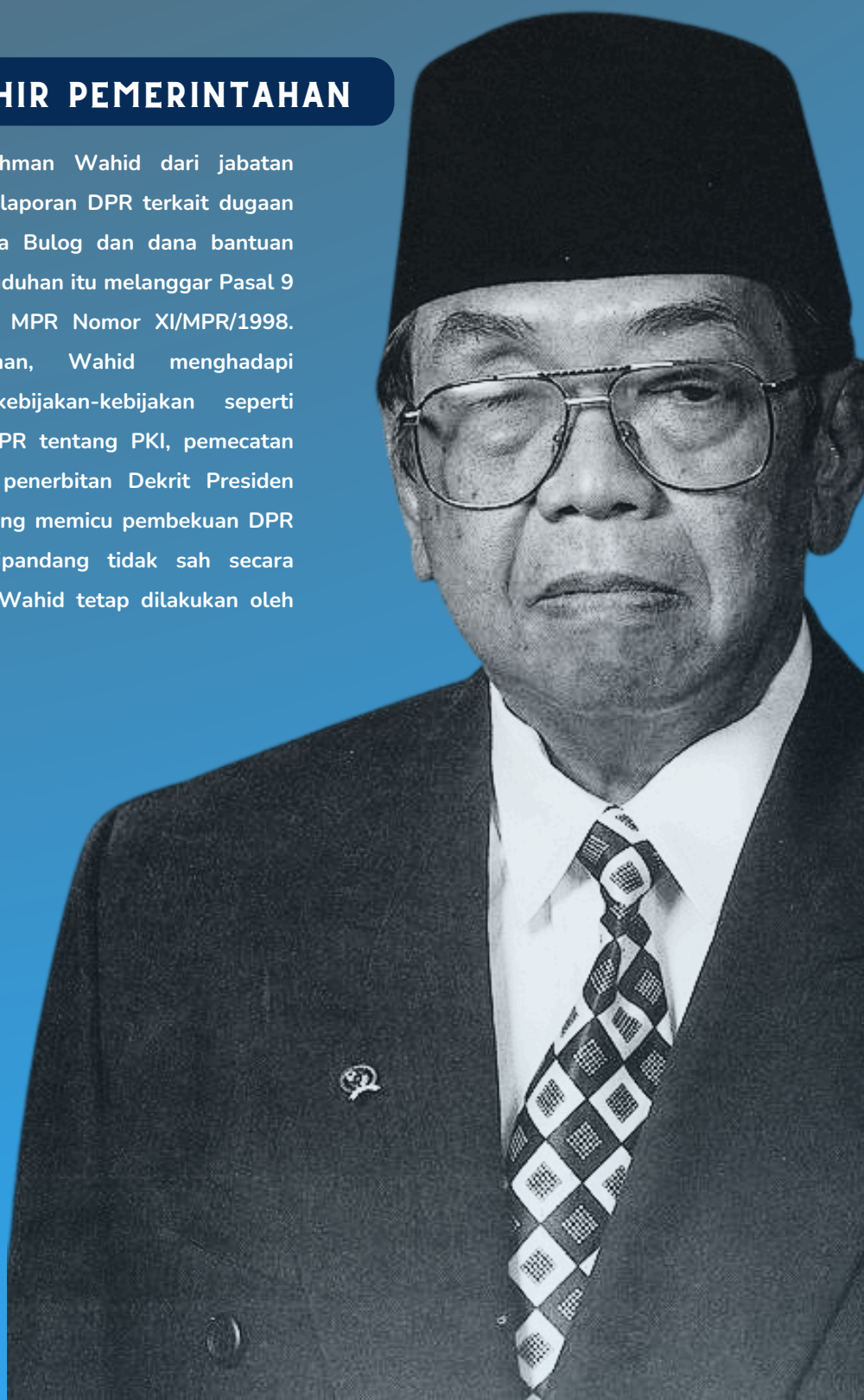
KEBIJAKAN SOSIAL-PENDIDIKAN

Abdurrahman Wahid, Presiden yang mengutamakan kebebasan dan toleransi, menerapkan kebijakan progresif untuk memulihkan hak sipil penganut agama Khonghucu dan menetapkan Tahun Baru China sebagai hari libur nasional melalui Keppres No. 6 Tahun 2000. Selain itu, dia juga memperjuangkan desentralisasi pendidikan dengan revisi UU No. 22/1999 dan No. 25/1999, mengubah pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan kualitasnya melalui partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat.



MASA AKHIR PEMERINTAHAN

Lengsernya Abdurrahman Wahid dari jabatan presiden dipicu oleh laporan DPR terkait dugaan penyalahgunaan dana Bulog dan dana bantuan dari Sultan Brunei. Tuduhan itu melanggar Pasal 9 UUD 1945 dan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998. Selama pemerintahan, Wahid menghadapi kontroversi atas kebijakan-kebijakan seperti penghapusan Tap MPR tentang PKI, pemecatan pejabat tinggi, dan penerbitan Dekrit Presiden pada 23 Juli 2001 yang memicu pembekuan DPR dan MPR. Meski dipandang tidak sah secara hukum, pemakzulan Wahid tetap dilakukan oleh MPR.



- <https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/04/150000679/kebijakan-abdurrahman-wahid-pada-masa-reformasi?page=all>
- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/presiden-dan-kebijakan-pendidikan-abdurrahman-wahid/>
- <https://kesbangpol.kulonprogo.go.id/detil/816/jatuhn-ya-presiden-gus-dur>